

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sianar Grafika.

Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Pnyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Atmadja, Dewa G. 2005. *Hukum Kostitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press.

Awangga, Arif. 2020. *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*. Jakarta: CV Cendekia Press.

Davidson, Scott. 1993. *Human Rights*. Open University Press.

- E. Sefullah. 2014. *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Cetakan Pertama. Bandung: P.T. Alumni.
- E. Suherman. 1979. *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Hanitjo, Rony & Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.

- Jayawickrama, Nihal. 2002. *The Judicial Application of Human Rights: National, Regional and International Jurisprudence*. Cambridge: University Press.
- K. Martono., Agus Pramono., dan Eka Budi Tjahjono. 2011. *Pembajakan, Angkutan, dan Keselamatan Penerbangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- K. Martono. 2007. *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Liliweri, Alo. 1991. *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta Selatan: PT Telaga Ilmu Indonesia.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nurmawati, Made., I Nengah Suantra., dan Luh Gede Astaryani. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Fakultas Hukum UNUD.
- Rachels, James. 2008. *Filsafat Moral*. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Siahaan, Rudy Haposan., *et al.* 2022. *Hukum kenotariatan Indonesia jilid*

I. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.

Smith, Rhona K. M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI

Press.

Sunggono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja

Grafindo.

Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Penegakan Hukum dalam Era*

Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar*

Pengadilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUDNRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentanng Keamanan dan

Keselamatan Penerbangan.

Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

Peraturan Menteri Nomor KM 26 tahun 2009 tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.

Keputusan Menteri Nomor 8 tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan.

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Pkps), Bagian 830, Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian atau Keterlambatan Kedatangan Pesawat Udara dan Prosedur Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian pada Pesawat Udara, angka 830.25.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Skep/35/IV/2004 tentang Investigative And Enforcement Procedures.

Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Chintya, Yoan. 2019 *Analisis Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Djauhari, R.A.Z. Kartini. 2020. Yurisdiksi Negara dan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Kadir, Abdul. 2006. Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Vol. 1(3).

Kantaatmadja, Mieke Komar. 1987. Peran Hukum Udara dalam Pengaturan Dan Pengembangan Industri Penerbangan, Industri Pesawat Udara di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Karya Latihan Wartawan II di Industri Pesawat Terbang Nusantara.

Kasim, Musim., Andi Pangerang Moenta., dan Ahmad Ruslan. 2019. Penataan Lembaga Non Struktural dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8(1).

Khair, Otti Ilham. 2022. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2(1).

- Marpaung, Leonald. 2017. Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional. *Artikel Diskumal TNI AL*. Dinas Hukum Angkatan Laut Indonesia.
- Noviawati, Evi. 2018. Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal*, Vol. 6(1).
- Poerwanto, Eko dan Uyuunul Mauidzoh. 2016. Analisa Kecelakaan Penerbangan di Indonesia untuk Peningkatan Keselamatan Penerbangan. *Jurnal Angkasa*, Vol. 8(2).
- Poerwanto, Eko. 2016. Analisis Kecelakaan Penerbangan di Indonesia untuk Peningkatan Keselamatan Penerbangan. *Jurnal Angkasa*, Vol. 8(2).
- Polamolo, S. 2013. Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan, Supremasi Hukum. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2(1): 97-124.
- Prabandani, Hendra W. *Outline Biro Hukum Bappenas, terkait Perbaikan Perenvanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. FH Universitas Jambi.
- Sidharta, Bernard A. 2004. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi III.
- Sinambela, Tanti Agustina. 2022. Legitimasi Aborsi oleh Korban Berdasarkan Hak untuk Hidup Janin. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5(2).

- Sinilele, Ashar. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. *Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan, Sulawesi Selatan*, Vol. 5(2).
- Sudaryanto. 2015. Tragedi Challenger (Tinjauan Etika Kantian dan Etika Utilitarian). *Jurnal Filsafat*, Vol. 25(2).
- Syafrudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia*. Edisi IV.
- Tambalean, Joshua. 2020. Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8(1).
- Wastuadhi, Andre Paminto. 2012. *Penyelenggaraan Penyelidikan dalam Mencari Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara Sipil yang Terjadi di Wilayah Indonesia*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Widiyanto, Yoga Pratama & Zainuri. 2022. Urgensi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat terhadap Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*.
- Yustitiningtyas, Levina., Basuki Babussalam., dan Asri Wijayanti. 2021. Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7(1).

D. Website

Auliani, Palupi Annisa. “Misteri Kecelakaan Boeing 737-500 Belum Berjawab”. Kompas. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/08335611/misteri-kecelakaan-boeing-737-500-sriwijaya-air-sjy-182-belum-berjawab?page=all>, diakses pada 10 Februari 2022.

Shalihah, Nur Fitriatur. “Hari Ini dalam Sejarah: Kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610, 189 Orang Meninggal”. Kompas. Diakses pada www.kompas.com/tren/read/2020/10/29/143000465/hari-ini-dalam-sejarah--kecelakaan-pesawat-lion-air-jt-610-189-orang?page=all, diakses pada 10 Februari 2022.

The National Transportation Safety Board (NTSB) is an independent agency of the United States Government responsible for the investigation of transportation accidents, <http://www.nts.gov>.

The National Transportation Safety Board (NTSB), investigations process, <http://www.nts.gov/investigations/process.html>.

